

## SEJARAH MUSLIM ROHINGNYA

**Sriliza**

UIN Alauddin, Makasar, Indonesia  
[sriliza1811@gmail.com](mailto:sriliza1811@gmail.com)

**Yusrain**

UIN Alauddin, Makasar, Indonesia  
[yusrainasshofwah@gmail.com](mailto:yusrainasshofwah@gmail.com)

**Elsa Mulya Karlina**

UIN Alauddin, Makasar, Indonesia  
[elsamulya2015@gmail.com](mailto:elsamulya2015@gmail.com)

### ABSTRACT

This jurnal discusses the long history of the Rohingya Muslim community living in the Rakhine region, Myanmar. Their history as a marginalized ethnic minority group involved in ongoing socio-political conflicts in the country is the main focus of this research. Through a historical approach, this Jurnal analyzes the origins of the Rohingya ethnic group, their interactions with Myanmar kingdoms in the past, and the impact of political changes and discriminatory policies on their status as citizens. This research also highlights the social and humanitarian struggles experienced by Rohingya Muslims, as well as how they face the challenges of a massive exodus due to violence that occurred in the last decade. By referring to various historical sources and international reports, this jurnal aims to provide a deeper understanding of the historical and humanitarian situation faced by the Rohingya Muslim community.

Keywords: *Muslim Rohingya, Rakhine, Myanmar*

### ABSTRAK

Jurnal ini membahas sejarah panjang komunitas Muslim Rohingya yang tinggal di wilayah Rakhine, Myanmar. Sejarah mereka sebagai kelompok etnis minoritas yang terpinggirkan dan terlibat dalam konflik sosial-politik yang berkelanjutan di negara tersebut, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Melalui pendekatan historis, jurnal ini menganalisis asal-usul etnis Rohingya, interaksi mereka dengan kerajaan-kerajaan Myanmar pada masa lampau, serta dampak perubahan politik dan kebijakan diskriminatif terhadap status mereka sebagai warga negara. Penelitian ini juga menyoroti perjuangan sosial dan kemanusiaan yang dialami oleh Muslim Rohingya, serta bagaimana mereka menghadapi tantangan eksodus besar-besaran akibat kekerasan yang terjadi pada dekade terakhir. Dengan merujuk pada berbagai sumber sejarah dan laporan internasional, jurnal ini



bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi sejarah dan kemanusiaan yang dihadapi oleh komunitas Muslim Rohingya.

Kata Kunci: *Muslim Rohingya, Rakhine, Myanmar*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum Masyarakat Rohingnya**

Masyarakat Rohingya adalah kelompok etnis yang sebagian besar beragama Islam dan berasal dari negara bagian Rakhine, Myanmar, yang terletak di sepanjang pantai barat negara tersebut, berbatasan dengan Bangladesh. Mereka telah lama menghadapi penindasan dan diskriminasi, baik dari pemerintah Myanmar maupun sebagian besar masyarakat Budha Myanmar. Pada dasarnya, Rohingya telah mendiami wilayah tersebut berabad-abad sebelumnya bahkan sebelum dikenal dengan bagian dari Myanmar. Sebagai kelompok Muslim, Rohingya berhubungan dengan berbagai kerajaan dan kesultanan Islam yang pernah ada di kawasan tersebut, seperti Kesultanan Arakan yang berdiri pada abad ke-15 hingga 18.

Pada abad ke-20, setelah kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, ketegangan antara mayoritas etnis Rakhine (Budha) dan minoritas Rohingya semakin meningkat. Ketegangan ini diperburuk oleh kebijakan pemerintah Myanmar yang mengabaikan hak-hak etnis Rohingya, serta kebijakan segregasi yang membatasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. (Wicaksono Agung, 2018)

Selama bertahun-tahun, Rohingya telah menjadi sasaran kebijakan diskriminatif, yang semakin memburuk setelah tahun 2012, ketika kekerasan sektarian meletus antara kelompok Budha Rakhine dan Muslim Rohingya. Pada tahun 2017, sebuah operasi militer yang besar dilakukan oleh Myanmar, yang menurut banyak laporan dari PBB dan organisasi HAM, merupakan kampanye pembersihan etnis terhadap Rohingya. Ribuan orang tewas, dan lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, menciptakan salah satu krisis pengungsi terbesar di dunia.<sup>1</sup>

Dalam konteks politik regional, Rohingya sering kali dipandang melalui lensa hubungan antara Myanmar dan negara-negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara dan sekitarnya. Ketika kekerasan terhadap Rohingya meningkat, banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh, mengutuk tindakan pemerintah Myanmar, yang berujung pada krisis pengungsi besar-besaran. Negara-negara ini, khususnya Bangladesh, menjadi tuan rumah bagi lebih dari satu juta pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan. (Lubis, Andi : 2019)

---

<sup>1</sup>

Politik Islam di kawasan ini memainkan peran penting dalam respons terhadap krisis Rohingya. Negara-negara dengan mayoritas Muslim merasa memiliki solidaritas agama dengan Rohingya, dan banyak dari mereka menuntut agar komunitas internasional, terutama negara-negara Barat, memberikan tekanan kepada Myanmar untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun demikian, reaksi internasional sering kali terbagi, dengan negara-negara besar seperti Cina dan Rusia cenderung mendukung Myanmar karena kepentingan geopolitik mereka di kawasan tersebut. (Fazar Reza, 2020)

## **PEMBAHASAN**

### **A. Latar Belakang Etnis Rohingnya dalam Konteks Sejarah**

#### **1. Asal usul Rohingnya sebelum masa penjajahan**

Sejarah Rohingya sebagai etnis Muslim di negara bagian Rakhine, Myanmar, sangat panjang dan berakar pada sejarah kerajaan Arakan (sekarang Rakhine) yang independen sebelum penjajahan Inggris. Rakhine (dulu dikenal sebagai Arakan) adalah sebuah wilayah yang terletak di sepanjang pantai barat Myanmar dan berbatasan langsung dengan Bangladesh. Pada abad ke-15, kerajaan Arakan mulai menjalin hubungan dengan dunia Islam, khususnya melalui interaksi dengan kerajaan-kerajaan Islam di Bengal (sekarang Bangladesh) dan India. Selama pemerintahan raja-raja Arakan, terdapat gelombang migrasi para pedagang dan pejuang Muslim dari Bengal, yang menetap di Arakan dan berasimilasi dengan masyarakat lokal.

Pada masa kerajaan Arakan, yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 hingga abad ke-18, banyak pengaruh budaya Islam yang masuk ke wilayah ini, baik melalui perdagangan, politik, maupun pernikahan antar kerajaan. Kerajaan Arakan memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan Kesultanan Bengal, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga menjadikan komunitas Muslim di Arakan berkembang pesat. Banyak sejarawan, seperti Rashiduzzaman (1977), yang berpendapat bahwa orang-orang Muslim yang datang dari Bengal dan India menjadi bagian dari masyarakat Arakan dan berasimilasi menjadi orang Rohingya. Sejarah mencatat bahwa pada masa itu, banyak orang dari Bengal dan wilayah lainnya, yang beragama Islam, menetap di Arakan. Menurut sejarawan seperti Rashiduzzaman (1977), orang-orang Muslim ini membawa serta agama dan kebudayaan mereka, menjadi bagian integral dari populasi lokal.

#### **2. Pengaruh Islam dan Hubungannya dengan Bengal**

Pada abad ke-16, ketika Kesultanan Arakan berada di puncak kejayaannya, kerajaan ini mengalami hubungan yang sangat erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di India, serta para pedagang dari kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan. Hal ini mengarah pada peningkatan jumlah Muslim yang datang ke wilayah ini, termasuk para pejuang dan pedagang dari Bengal, Gujarat, dan bahkan dari wilayah Persia.

Kesultanan Arakan dan Pengaruh Islam: Dalam sejarahnya, Arakan (Rakhine) pernah menjadi kerajaan yang relatif independen, yang terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Pengaruh Islam cukup kuat pada periode ini, terutama pada abad ke-16 hingga ke-18, yang tercermin dalam banyaknya pedagang Muslim dan budaya Islam yang berkembang di kawasan ini. Kerajaan Arakan memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Kesultanan Bengal yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan banyak orang Muslim yang menetap di wilayah tersebut. Sebagai contoh, pada abad ke-16, ketika Arakan dipimpin oleh Raja Munim Khan, pengaruh Islam sangat terasa. Banyak Muslim yang datang untuk berdagang dan menetap. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa banyak orang Muslim Arakan yang mungkin merupakan keturunan dari orang Bengal yang berasimilasi dengan masyarakat lokal Arakan. (Simmons, 2013)

### **3. Identitas Budaya dan Bahasa**

Identitas budaya Rohingya tidak terlepas dari pengaruh budaya lokal Myanmar dan Bangladesh, mengingat letak geografis dan hubungan sejarah mereka dengan kedua negara tersebut. Pakaian tradisional masyarakat Rohingya sangat mirip dengan masyarakat Muslim di negara-negara Asia Selatan, terutama Bangladesh. Para wanita biasanya mengenakan hijab atau jilbab, sementara pria sering memakai pakaian longgar seperti kurta dan lungi (sarung). Dalam konteks perayaan, pakaian mereka lebih formal dan berwarna cerah.

Bahasa Rohingya (juga disebut Rohingya atau Ruáingga) adalah bagian penting dari identitas mereka. Bahasa ini adalah varian dari bahasa Chittagonian, yang merupakan bahasa Indo-Arya yang digunakan di Bangladesh, dan sangat mirip dengan bahasa Bengali dan Chittagonian yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar. Bahasa Rohingya berakar pada bahasa Chittagonian, tetapi memiliki beberapa elemen khas yang membedakannya. Secara gramatikal, bahasa Rohingya memiliki kesamaan dengan bahasa Bengali, tetapi dengan kosakata dan pengucapan yang berbeda. Banyak kata dalam bahasa Rohingya berasal dari bahasa Arab, Persia, dan Urdu, mencerminkan pengaruh Islam yang kuat dalam budaya mereka. (Bashar, 2011)

## B. Era Penjajahan Inggris (Dampak Pemerintahan Inggris (1824–1948))

Inggris menguasai Burma setelah Perang Anglo-Burma pertama (1824–1826), yang berlanjut dengan penaklukan sepenuhnya pada 1886 setelah Perang Anglo-Burma ketiga. Selama periode ini, Inggris memerintah Burma sebagai bagian dari Raj Britania yang lebih besar. Inggris tidak hanya menambah kekuasaannya atas Burma, tetapi juga memperkenalkan kebijakan imigrasi yang memengaruhi demografi wilayah tersebut, termasuk kedatangan lebih banyak orang dari India, yang kemudian berdampak pada hubungan antar kelompok etnis di Burma.

### 1. Kebijakan Imigrasi dan Dampaknya terhadap Demografi

Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi dan politik mereka, Inggris mendorong imigrasi dari India ke Burma, terutama untuk bekerja di perkebunan dan infrastruktur. Sebagian besar imigran berasal dari wilayah Benggala (yang mencakup daerah yang sekarang menjadi Bangladesh), yang memiliki populasi Muslim yang besar. Imigrasi ini terutama terjadi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. (James, 2004)

Di Rakhine, salah satu wilayah yang paling terpengaruh oleh kebijakan ini, banyak orang Bengali yang bermigrasi, dan sebagian dari mereka menetap di daerah pesisir dan pedesaan. Mereka dikenal sebagai Rohingya (atau "Rooinga"), meskipun pada waktu itu istilah ini belum sepenuhnya diterima atau dipakai oleh pemerintah kolonial. Banyak dari mereka bekerja di sektor pertanian, yang menjadi alasan mereka banyak tinggal di daerah pesisir Rakhine, yang sebelumnya kurang berkembang.

Pada masa pemerintahan Inggris, jumlah populasi Muslim Rohingya meningkat secara signifikan, sementara jumlah populasi Buddha Rakhine tetap lebih stabil atau bahkan sedikit menurun. Ini menciptakan ketegangan etnis antara dua kelompok tersebut. Komunitas Muslim Rohingya merasa bahwa mereka memiliki hak untuk tinggal di wilayah tersebut, mengingat akar sejarah mereka yang sudah berabad-abad di kawasan itu. Namun, bagi komunitas Buddha Rakhine, kedatangan imigran Muslim ini dipandang sebagai ancaman terhadap budaya dan identitas mereka. (Ibrahim.A, 2016)

### 2. Perpecahan Antara Etnis Muslim Rohingya dan Buddha Rakhine

Selama era penjajahan Inggris, ketegangan antara komunitas Muslim Rohingya dan Buddha Rakhine semakin meningkat. Ini terjadi karena beberapa alasan:

**a. Kompetisi Ekonomi:** Banyak orang Rohingya yang datang ke Rakhine untuk bekerja di sektor pertanian, yang sering kali bersaing dengan orang Rakhine Buddha dalam hal pekerjaan dan sumber daya ekonomi. Kehadiran lebih banyak imigran Muslim meningkatkan ketegangan dengan komunitas lokal Buddha,

yang merasa bahwa mereka kehilangan pekerjaan atau akses terhadap tanah. (Tan.S, 2001)

**b. Kebijakan Pemisahan Inggris:** Inggris sering kali menggunakan strategi “pecah belah dan kuasai” dengan mengadu domba berbagai kelompok etnis untuk memudahkan pengendalian. Mereka memperburuk ketegangan antara komunitas Muslim Rohingya dan Buddha Rakhine dengan memberikan lebih banyak hak kepada kelompok yang lebih patuh atau yang dianggap lebih menguntungkan bagi tujuan kolonial mereka. Dalam beberapa kasus, mereka memberikan lebih banyak hak kepada komunitas Muslim, yang memicu ketidakpuasan di kalangan kelompok Buddha lokal. (Win.H, 2010)

**c. Pembagian Agama dan Identitas:** Agama memainkan peran besar dalam perpecahan ini. Meskipun Rohingya adalah Muslim, mereka sering kali dianggap oleh sebagian orang Rakhine sebagai orang asing (karena kedatangan mereka dari Bengal) dan sebagai pesaing dalam mempertahankan kontrol atas wilayah Rakhine. Sementara itu, orang Rakhine Buddha memandang diri mereka sebagai pemilik sah wilayah tersebut, yang telah lama menjadi pusat agama dan kebudayaan Buddha. (Kumar,r.2008)

Peningkatan ketegangan terjadi pada tahun 1930–1940-an yang disebabkan oleh beberapa faktor: **Protes dan Kerusuhan**. Ketika pemerintah Inggris semakin lemah selama Perang Dunia II, kelompok-kelompok etnis di Burma mulai memperjuangkan kemerdekaan. Pada periode ini, terjadi beberapa kerusuhan dan kekerasan etnis antara komunitas Rohingya dan Rakhine. (Lee.T.2007)

**Perpecahan Politik:** Ketika Burma berjuang untuk merdeka, komunitas Rohingya dan Rakhine memiliki pandangan politik yang berbeda. Sebagian besar komunitas Rohingya cenderung lebih mendukung Inggris dan lebih pro-Islam, sementara komunitas Rakhine lebih cenderung mendukung kemerdekaan Burma dan sering kali merasa bahwa mereka lebih dekat dengan komunitas Buddhis lainnya di Asia. (Zaw,P.2012)

Pada saat Jepang menginvasi Burma selama Perang Dunia II, baik komunitas Rohingya maupun Rakhine terlibat dalam perjuangan melawan penjajah Jepang. Namun, setelah Jepang kalah, ketegangan antara kedua kelompok etnis semakin meningkat, dengan masing-masing pihak berusaha memperebutkan kekuasaan atas wilayah Rakhine. Setelah Burma merdeka pada 1948, ketegangan ini terus berlanjut, dengan Rohingya yang merasa terpinggirkan dan Rakhine yang berusaha menegakkan dominasi mereka di wilayah tersebut. (Maung,P.1997)

### **Perkembangan Pasca Kolonial: Independensi dan Krisis Identitas**

Setelah kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, perjuangan identitas etnis Muslim Rohingya menjadi lebih kompleks, dengan krisis identitas yang diperburuk oleh kebijakan nasionalisme yang lebih eksklusif, terutama setelah pemerintahan militer yang dimulai pada 1962.

## **1. Kondisi Pasca-Kolonial Myanmar 1948-1962**

Pada 4 Januari 1948, Myanmar (yang pada waktu itu dikenal sebagai Burma) merdeka dari Inggris dan menjadi negara yang berdaulat. Pada awalnya, kemerdekaan membawa harapan bagi banyak kelompok etnis yang berbeda di Myanmar untuk memperoleh pengakuan dan hak-hak mereka. Namun, realitas pasca-kemerdekaan jauh lebih kompleks. (Suryadi,A.2020)

### **a. Perjuangan Identitas Rohingya Setelah Kemerdekaan**

Setelah kemerdekaan Myanmar, etnis Rohingya berjuang untuk diakui sebagai bagian dari bangsa Myanmar yang sah. Namun, pada saat itu, mereka sudah menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan pengakuan. Di bawah pemerintahan pertama yang dipimpin oleh Presiden Sao Shwe Thaik dan Perdana Menteri U Nu, kebijakan pemerintah Myanmar lebih mengutamakan kelompok etnis mayoritas Burma yang beragama Buddha dan mengabaikan hak-hak kelompok etnis minoritas, termasuk Rohingya (Suryadi, 2020: 114). Pemerintah Myanmar pada masa ini tidak secara resmi mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis yang terpisah. Bahkan, mereka dimasukkan ke dalam kategori "Bengali," yang dianggap sebagai imigran asing dan bukan penduduk asli Rakhine. Hal ini menambah perasaan ketidakadilan bagi komunitas Rohingya, yang merasa bahwa mereka telah lama tinggal di wilayah Rakhine (sejak zaman sebelum penjajahan Inggris) dan memiliki hak yang sah atas tanah dan tempat tinggal mereka. (Fahmi,M. 2019)

### **b. Krisis Identitas Rohingya**

Krisis identitas etnis Rohingya pasca-kemerdekaan muncul karena mereka tidak hanya mengalami diskriminasi dalam hal kewarganegaraan tetapi juga dalam hal pengakuan budaya dan bahasa. Bahasa Rohingya, yang secara linguistik mirip dengan bahasa Bengali, sering kali dipandang sebagai bahasa asing oleh masyarakat Myanmar, terutama oleh kelompok Buddha Rakhine, yang melihat bahasa tersebut sebagai simbol dari "penyerbuan" budaya dan agama Muslim. Ini memperburuk rasa ketidakamanan etnis yang dimiliki oleh Rohingya, yang merasa bahwa identitas mereka tidak diakui oleh negara mereka sendiri. (Putra,Y.2018)

## **2. Pemberontakan dan Reaksi Nasionalis Myanmar (1962 dan Setelahnnya)**

Pada 1962, pemerintah Myanmar jatuh ke tangan Jenderal Ne Win, yang memulai era pemerintahan militer yang berlangsung lama. Pada masa ini, nasionalisme Burma yang eksklusif semakin menguat, dan kebijakan pemerintah semakin mengarah pada penindasan terhadap minoritas, termasuk Rohingya. (Fahmi, 2019)

**a. Kebijakan Nasionalisme Eksklusif**

Di bawah pemerintahan militer, konsep "Myanmar" menjadi sangat dikaitkan dengan identitas Buddha, dan mayoritas etnis yang beragama Buddha. Pemerintah Myanmar, yang didominasi oleh etnis Burman (Buddha), memandang bahwa mereka adalah inti dari bangsa Myanmar, sementara kelompok etnis lainnya dianggap sebagai pihak luar atau tidak sepenuhnya menjadi bagian dari negara. Rohingya, yang merupakan kelompok Muslim, dianggap sebagai ancaman terhadap kesatuan nasional, dan mereka dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meskipun mereka sudah lama tinggal di Rakhine. (Putra, Y. 2018) Salah satu langkah paling signifikan yang diambil oleh pemerintah Myanmar pasca-1962 adalah Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, yang mengharuskan etnis Rohingya untuk membuktikan bahwa mereka adalah warga negara Myanmar melalui berbagai prosedur administrasi yang sangat ketat. Namun, banyak Rohingya yang gagal memenuhi persyaratan ini karena tidak memiliki dokumen atau bukti sejarah yang diakui oleh pemerintah. Undang-Undang ini secara efektif membuang banyak Rohingya dari status kewarganegaraan mereka dan menganggap mereka sebagai orang asing. (Fahmi, 2019)

**b. Pemberontakan Rohingya dan Penindasan Militer**

Pada akhir 1970-an dan 1980-an, ketidakpuasan yang meluas di kalangan komunitas Rohingya mulai mengarah pada pemberontakan bersenjata, seperti yang dilakukan oleh Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) pada 2017. Pemberontakan ini, meskipun terbatas dalam skala, memicu aksi balasan yang keras dari militer Myanmar, yang sering kali melibatkan kekerasan terhadap warga sipil Rohingya. (Fahmi, 2019) Nasionalisme eksklusif ini semakin memperburuk perpecahan antara komunitas Rohingya dan Buddha Rakhine, dengan perasaan saling curiga dan kebencian yang semakin dalam. Orang-orang Rakhine sering kali melihat Rohingya sebagai kelompok yang asing, meskipun mereka telah tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad. (Suryadi, A. 2020)

**A. Dinamika Politik (Perjuangan Hak 1970-an hingga awal 2000-an)**

**1. Konstruksi Rohingya sebagai Kelompok Imigran Ilegal pada 1970-an**

Pada tahun 1970-an, pemerintah Myanmar yang saat itu masih di bawah pemerintahan militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win mulai mengkonstruksi Rohingya sebagai "imigran ilegal." Meskipun komunitas Rohingya telah lama tinggal di wilayah Rakhine sejak berabad-abad lalu, pemerintah Myanmar mulai melihat mereka melalui lensa yang semakin eksklusif, dengan narasi bahwa mereka berasal dari wilayah Bengal (sekarang Bangladesh) dan tidak memiliki hak untuk dianggap sebagai bagian dari komunitas etnis Myanmar. Pandangan ini berakar pada kebijakan diskriminatif yang diterapkan untuk memperkuat identitas nasional Myanmar yang dominan etnis Burman-Buddha.

a. **Kebijakan Militer dan Politik Identitas**

Setelah militer Myanmar berkuasa pada 1962, pemerintah mulai mengembangkan kebijakan yang menekankan identitas etnis sebagai dasar utama negara bangsa Myanmar. Dalam konteks ini, etnis Burman dan agama Buddha dijadikan unsur utama yang harus dilestarikan, sementara kelompok etnis dan agama lainnya, termasuk Rohingya, mengalami marginalisasi. Kelompok Rohingya dipersepsikan sebagai orang asing, terlepas dari kenyataan bahwa mereka telah tinggal di Rakhine selama berabad-abad, bahkan sebelum era kolonial Inggris. Kebijakan ini, yang berfokus pada nasionalisme etnis dan agama, memicu proses diskriminasi yang sistematis terhadap komunitas Rohingya. (Hasan, M. 2014)

b. **Kebijakan Registrasi dan Pencatatan Kewarganegaraan (1970-an)**

Pada tahun 1974, pemerintah Myanmar meluncurkan kebijakan pencatatan kewarganegaraan yang bertujuan untuk mengklasifikasikan identitas kewarganegaraan berdasarkan etnis tertentu. Dalam kerangka ini, Rohingya dan beberapa kelompok Muslim lainnya tidak dimasukkan dalam daftar etnis yang diakui oleh negara. Mereka dianggap sebagai "Bengali," yang digambarkan sebagai imigran ilegal yang datang pada masa penjajahan Inggris. Kebijakan ini memberikan dasar hukum untuk menolak kewarganegaraan bagi Rohingya dan mengkriminalisasi keberadaan mereka di negara tersebut. (Suryadinata, L. 2001)

c. **Operasi Naga (1978)**

Pada 1978, pemerintah Myanmar melaksanakan operasi militer besar-besaran yang dikenal dengan nama Operasi Naga. Operasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menindak "imigran ilegal" yang berasal dari Bangladesh, yang termasuk dalam kategori yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rohingya. Dalam operasi ini, banyak warga Rohingya yang dipaksa meninggalkan rumah mereka, dibatasi hak-haknya untuk tinggal dan bekerja, dan diusir ke daerah yang lebih

terpencil. Beberapa di antaranya melarikan diri ke Bangladesh dan negara-negara lain, menciptakan krisis pengungsi yang serius. Kebijakan ini memperburuk situasi sosial-politik di wilayah Rakhine dan semakin mempertegas konstruksi identitas Rohingya sebagai "imigran ilegal." (Friedman, 1980)

**d. Sentimen Anti-Rohingya dan Ketegangan Sosial**

Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Myanmar untuk mengkriminalisasi Rohingya juga menciptakan sentimen anti-Rohingya di kalangan masyarakat. Negara, yang didominasi oleh etnis Burman, menggunakan retorika bahwa Rohingya adalah kelompok "asing" yang mengancam kesatuan nasional. Hal ini menyebabkan masyarakat Buddha Rakhine, yang terpengaruh oleh propaganda pemerintah, memandang Rohingya dengan kebencian dan ketidakpercayaan. Ketegangan etnis yang meningkat ini memperburuk situasi di wilayah Rakhine, menyebabkan kekerasan sosial dan peminggiran lebih lanjut terhadap komunitas Rohingya.

**2. Kebijakan Diskriminatif dan Kekerasan yang Disetujui Negara**

Selama dekade-dekade berikutnya, pemerintah Myanmar melanjutkan kebijakan diskriminatif yang menargetkan Rohingya, membatasi hak-hak mereka dan meningkatkan kekerasan terhadap mereka. Berikut adalah beberapa kebijakan diskriminatif yang disetujui negara dan kekerasan yang terjadi:

**a. Undang-Undang Kewarganegaraan 1982**

Pada 1982, Myanmar memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan yang secara eksplisit tidak mengakui Rohingya sebagai etnis yang sah di negara tersebut. Undang-undang ini membagi kewarganegaraan Myanmar menjadi tiga kategori: kewarganegaraan penuh, kewarganegaraan asosiasi, dan kewarganegaraan yang tidak terasosiasi. Etnis Rohingya tidak masuk dalam kategori manapun, yang mengakibatkan banyak dari mereka kehilangan kewarganegaraannya secara de facto. Undang-undang ini membatasi hak-hak mereka untuk mendapatkan akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. (Rahman,A.2002)

**b. Kebijakan Pemisahan dan Pembatasan Hak-Hak Sosial**

Selain diskriminasi dalam hal kewarganegaraan, Rohingya juga mengalami pembatasan ketat dalam kehidupan sosial mereka. Mereka dihadapkan pada pembatasan mobilitas yang ketat dan tidak dapat mengakses banyak layanan publik, termasuk pendidikan dan layanan

kesehatan. Mereka juga tidak diizinkan untuk menikah tanpa izin dari pemerintah, yang merupakan bentuk kontrol yang sangat invasif terhadap kehidupan pribadi mereka. (Sumarno, W.2019)

**c. Kekerasan Negara dan Pembersihan Etnis**

Kekerasan terhadap Rohingya meningkat drastis pada tahun-tahun berikutnya. Salah satu insiden paling signifikan adalah kerusuhan 2012 di Rakhine, di mana bentrokan antara komunitas Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya menyebabkan lebih dari 100 orang tewas dan ribuan lainnya terlantar. Pemerintah Myanmar dianggap tidak cukup bertindak untuk menghentikan kekerasan ini, dan banyak yang menganggap ini sebagai bentuk pembiaran atau bahkan dukungan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis Buddha. Pada 2017, kekerasan terhadap Rohingya mencapai puncaknya dengan serangan militer besar-besaran yang dikenal dengan nama pembersihan etnis Rohingya. Operasi militer yang dimulai setelah serangan oleh kelompok pemberontak ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) ini mengakibatkan lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Kekerasan yang terjadi termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran desa, dan pengusiran paksa. PBB dan organisasi internasional lainnya mengutuk aksi militer ini sebagai pembersihan etnis dan pelanggaran hak asasi manusia yang parah. (Haris, A.2020)

**d. Retorika Negara dan Legitimasinya**

Retorika pemerintah Myanmar yang menggambarkan Rohingya sebagai "Bengali" dan "teroris" memainkan peran penting dalam legitimasi kekerasan negara terhadap mereka. Negara Myanmar membenarkan tindakan keras terhadap Rohingya dengan menyebut mereka sebagai ancaman bagi keamanan nasional, meskipun banyak bukti menunjukkan bahwa Rohingya lebih sering menjadi korban daripada pelaku kekerasan. (Susanto, R.2021)

**B. Kerusuhan 2012 dan Peningkatan Kekerasan**

Kerusuhan etnis 2012 di Myanmar merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kekerasan antara komunitas Muslim Rohingya dan Buddha Rakhine di negara tersebut. Insiden ini menandai eskalasi kekerasan yang semakin meningkat terhadap komunitas Rohingya, dan berkontribusi besar terhadap terjadinya pengungsian massal serta peningkatan ketegangan sosial yang terus berlangsung. Untuk memahami kerusuhan tersebut, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan, tanggapan pemerintah Myanmar, serta dampaknya terhadap struktur sosial dan komunitas Rohingya.

## **1. Faktor-Faktor Penyebab Kerusuhan Etnis 2012**

### **a. Persaingan Sumber Daya dan Ekonomi**

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kerusuhan etnis adalah persaingan

sumber daya antara komunitas Rohingya dan Buddha Rakhine. Rakhine adalah salah satu negara bagian paling miskin di Myanmar, dan persaingan untuk pekerjaan, tanah, dan akses ke sumber daya sangat ketat. Komunitas Rohingya, yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan perikanan, sering kali bersaing dengan masyarakat Buddha Rakhine dalam hal pekerjaan dan lahan. Ketegangan ini memuncak ketika ada kesenjangan ekonomi yang semakin dalam antara kedua kelompok, terutama dengan kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan etnis Buddha Rakhine. (Sukandar, R. 2014)

### **b. Politik Identitas dan Nasionalisme**

Salah satu penyebab utama kerusuhan adalah politik identitas dan nasionalisme yang kuat yang berkembang di Myanmar, terutama setelah negara tersebut berada di bawah kekuasaan militer pada 1962. Nasionalisme Myanmar, yang secara eksklusif mengaitkan identitas nasional dengan agama Buddha, menciptakan ketegangan antara mayoritas Buddhis Burman dan berbagai kelompok etnis lainnya, termasuk Rohingya. Sejak kemerdekaan Myanmar pada 1948, Rohingya, yang merupakan Muslim, telah dikonstruksi oleh pemerintah dan masyarakat Myanmar sebagai "imigran ilegal" yang tidak memiliki hak untuk tinggal di Myanmar, meskipun mereka telah lama tinggal di wilayah tersebut. Diskriminasi ini semakin memperburuk perasaan tidak diterima yang dirasakan oleh komunitas Rohingya. (Taufik, H.2017)

### **c. Keterlibatan Radikalisasi dan Kelompok Ekstremis**

Peningkatan ketegangan etnis juga dipicu oleh radikalisasi di kedua sisi konflik. Komunitas Buddha Rakhine, yang sebagian dipengaruhi oleh kelompok ekstremis Buddha yang percaya bahwa Rohingya adalah ancaman terhadap budaya dan agama Buddha, mulai menanggapi serangan-serangan kecil dengan kekerasan yang lebih besar. Sebaliknya, meskipun sebagian besar Rohingya adalah orang damai, ada sebagian kecil yang terlibat dalam pemberontakan bersenjata, yang lebih dikenal dengan nama Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), yang pada 2017 melakukan serangan terhadap pos-pos keamanan militer. Meskipun demikian, kekerasan yang dilakukan oleh ARSA tidak membenarkan skala kekerasan yang dihadapi oleh komunitas Rohingya pada umumnya. (Andriani, S.2015)

### **d. Insiden Pemerkosaan yang Memicu Ketegangan**

Salah satu pemicu langsung dari kerusuhan etnis 2012 adalah insiden pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita Buddha Rakhine oleh pria Rohingya pada 28 Mei 2012. Pembunuhan ini memicu serangan balasan dari massa Buddha Rakhine yang menargetkan Rohingya. Setelah insiden ini, ketegangan meningkat dengan cepat, memicu kerusuhan yang melibatkan pembakaran rumah, pembunuhan, dan kekerasan lainnya. Kebencian etnis yang telah lama ada akhirnya meledak menjadi kekerasan yang meluas.

## **2. Tanggapan Pemerintah Myanmar terhadap Kerusuhan 2012**

### **a. Pendekatan Pemerintah yang Cenderung Menyalahkan Rohingya**

Pemerintah Myanmar, di bawah pemerintahan Presiden Thein Sein (yang berkuasa setelah transisi ke pemerintahan sipil pada 2011), mengadopsi pendekatan yang sangat terbatas terhadap krisis ini. Alih-alih mengatasi akar masalah dengan memberikan solusi inklusif untuk kedua belah pihak, pemerintah cenderung menyalahkan komunitas Rohingya atas kerusuhan tersebut. Dalam banyak pernyataan resmi, pemerintah menggambarkan Rohingya sebagai "Bengali" yang tidak memiliki hak atas kewarganegaraan dan secara terang-terangan mendukung pembatasan hak-hak mereka.

### **b. Penggunaan Pasukan Keamanan yang Berlebihan**

Dalam merespons kerusuhan, pemerintah Myanmar menerjunkan pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan berlebihan untuk menanggulangi kerusuhan. Namun, pasukan keamanan ini seringkali bersekutu dengan kelompok Buddha Rakhine atau setidaknya membiarkan kekerasan yang menargetkan Rohingya berlangsung tanpa intervensi berarti. Selain itu, pasukan militer Myanmar terlibat dalam pembakaran desa-desa Rohingya dan tindak kekerasan lain, yang oleh banyak pengamat internasional dipandang sebagai pembersihan etnis yang sistematis.

### **c. Keengganan untuk Mengakui Kekerasan sebagai Pembersihan Etnis**

Pemerintah Myanmar secara konsisten menolak tuduhan bahwa kekerasan terhadap Rohingya adalah bagian dari pembersihan etnis. Bahkan, ketika laporan dari PBB dan kelompok hak asasi manusia menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang parah, pemerintah Myanmar berpegang teguh pada narasi bahwa kekerasan tersebut adalah akibat dari bentrokan sosial antara dua kelompok yang berbeda, tanpa memberikan tanggung jawab kepada negara atau pasukan keamanan.

## **C. IMPLIKASI KERUSUHAN ETNIS 2012 DAN PENGUNGSIAN 2017**

Kerusuhan etnis 2012 dan kekerasan yang meningkat pada 2017 di Myanmar telah memberikan dampak besar bagi komunitas Rohingya. Dampak-dampak tersebut berujung pada pengungsian massal ke negara tetangga, terutama Bangladesh. Kedua peristiwa ini telah menciptakan krisis kemanusiaan yang sangat mendalam dan mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi komunitas Rohingya.

**a. Pengungsian Massal dan Pemindahan Paksa**

Pada kerusuhan 2012, lebih dari 100 orang tewas dan ribuan lainnya terpaksa mengungsi, kebanyakan ke kamp-kamp pengungsi di wilayah Rakhine. (Terkini, A.2015) Banyak komunitas Rohingya yang kehilangan tempat tinggal dan terperangkap dalam kondisi yang sangat buruk, dengan keterbatasan akses ke makanan, perawatan medis, atau pendidikan. Hal ini semakin memperburuk kondisi kemiskinan yang telah lama dialami oleh komunitas ini."Kerusuhan tersebut tidak hanya memusnahkan kehidupan fisik mereka, tetapi juga memperburuk status sosial ekonomi yang sudah terpinggirkan."(Anwar,M.2019)

**b. Peningkatan Pemisahan Sosial**

Kekerasan yang terjadi dalam kerusuhan etnis tersebut memperdalam perpecahan sosial antara komunitas Rohingya dan Buddha Rakhine. Kedua kelompok ini semakin terpisah, baik secara sosial, ekonomi, dan geografis. Sebagai contoh, Rohingya dipaksa tinggal di desa-desa terisolasi, dengan akses yang terbatas terhadap berbagai fasilitas. (Kusuma,I.2018) Pemisahan ini bukan hanya terjadi dalam ranah fisik, tetapi juga dalam aspek kehidupan sosial yang lebih luas.

**c. Kerusakan pada Struktur Sosial Rohingya**

Kekerasan dan pengungsian massal menghancurkan struktur sosial yang rapuh di dalam komunitas Rohingya. Banyak keluarga kehilangan rumah dan harta benda mereka, dan pemimpin-pemimpin mereka semakin tidak berdaya dalam melindungi komunitas mereka. "Trauma yang ditimbulkan oleh kekerasan yang berulang kali membuat generasi muda Rohingya tumbuh dalam ketidakpastian dan ketakutan."(Supriyadi,B.2020)

**d. Pengungsian Massal 2017**

Pada Agustus 2017, kekerasan terhadap Rohingya mencapai puncaknya setelah serangan oleh kelompok pemberontak Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Respons dari militer Myanmar adalah Operasi Pembersihan Etnis yang mengarah pada pembakaran massal desa, pemerkosaan, dan pembunuhan. (Simmamora, 2018) Akibat kekerasan

ini, lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, menciptakan salah satu krisis pengungsi terbesar di dunia. (Arifin Z,2017)

**e. Kondisi Pengungsi di Bangladesh**

Setelah pengungsian 2017, mayoritas Rohingya mencari perlindungan di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh, seperti Kamp Kutupalong yang sudah sangat padat. Meskipun bantuan internasional datang, kondisi di kamp-kamp ini sangat memprihatinkan. Pengungsi hidup dalam tenda-tenda darurat dengan sedikit akses ke air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. (Alam,F 2021) Selain itu, perempuan dan anak-anak sering menjadi korban kekerasan seksual dan eksploitasi. (Hartati,D.2019)

**G. TANGGAPAN GLOBAL TERHADAP KRISIS ROHINNYA**

**a. Tanggapan PBB dan Organisasi Internasional**

Komunitas internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah memberikan reaksi yang cukup besar terhadap krisis Rohingya. Beberapa langkah yang diambil oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional meliputi:

**Penyelidikan terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia:** PBB mendirikan Komisi Penyelidikan Independen untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap Rohingya. Laporan dari Komisi Penyelidikan ini menunjukkan bahwa Myanmar melakukan pembersihan etnis dan pelanggaran berat lainnya terhadap Rohingya, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa-desa mereka. (Mulyana, A 2018)

**Bantuan Kemanusiaan:** Organisasi internasional seperti UNHCR dan ICRC memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh. Bantuan ini mencakup makanan, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan darurat. Namun, keterbatasan dana dan tantangan logistik sering kali menghalangi penyampaian bantuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh pengungsi. (Ramadhan,Z.2019)

**Tekanan Diplomatik terhadap Myanmar:** Negara-negara dan organisasi internasional, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat, memberikan tekanan diplomatik kepada pemerintah Myanmar untuk mengakhiri kekerasan dan memberikan hak-hak dasar kepada Rohingya. Beberapa negara bahkan mengenakan sanksi terhadap pejabat Myanmar yang

terlibat dalam pelanggaran terhadap Rohingya. Namun, tekanan ini seringkali terbentur pada kedaulatan Myanmar dan dukungan dari negara-negara besar seperti China dan Rusia. (Wijayanti, 2020)

#### **b. Tanggapan Negara-Negara Tetangga**

Bangladesh, yang menjadi negara tujuan utama bagi pengungsi Rohingya, menghadapi tantangan besar dalam menangani krisis ini. Meskipun Bangladesh telah menyediakan tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta pengungsi, negara ini menghadapi kesulitan dalam memberikan bantuan yang memadai, mengingat ketidakpastian anggaran dan infrastruktur yang terbatas. (Salim,F.2021)

Bangladesh juga menghadapi tekanan internasional untuk mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi Rohingya. Namun, meskipun ada upaya untuk memfasilitasi repatriasi Rohingya ke Myanmar, proses tersebut terhambat oleh ketidakpastian dan ketakutan pengungsi terhadap keselamatan mereka di Myanmar. (Sutrisno, 2022)

### **KESIMPULAN**

- 1. Asal Usul dan Sejarah Rohingya:** Komunitas Rohingya telah lama mendiami wilayah Arakan (sekarang Rakhine) yang terletak di barat Myanmar. Sejarah mereka sebagai bagian dari kerajaan Arakan yang kaya budaya, serta hubungan mereka dengan kerajaan-kerajaan Muslim di Asia Selatan, menunjukkan bahwa mereka memiliki akar yang dalam di wilayah ini.
- 2. Isu Kewarganegaraan dan Diskriminasi:** Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Muslim Rohingya adalah diskriminasi sistematis yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Sejak kemerdekaan Myanmar pada 1948, mereka secara perlahan-lahan kehilangan hak-hak dasar, termasuk hak kewarganegaraan, yang mengarah pada pengucilan sosial dan marginalisasi.
- 3. Konflik dan Krisis Pengungsi:** Konflik etnis dan agama yang berlangsung dengan intensitas tinggi, khususnya pada tahun-tahun terakhir, menyebabkan ribuan Rohingya terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh. Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas ini menjadi sorotan internasional.
- 4. Tantangan untuk Masa Depan:** Meskipun ada upaya internasional untuk membantu komunitas Rohingya, kesulitan yang mereka hadapi dalam memperoleh pengakuan hak-hak mereka sebagai warga negara Myanmar

masih berlanjut. Stabilitas dan perdamaian di wilayah ini memerlukan solusi jangka panjang yang melibatkan reformasi politik dan sosial di Myanmar.

Secara keseluruhan, kesimpulannya adalah bahwa Rohingya telah menghadapi perjuangan yang sangat panjang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan di tanah air mereka. Penyelesaian atas masalah yang mereka hadapi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup hak asasi manusia, rekonsiliasi sosial, dan penegakan hukum di Myanmar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alam, F. (2021). *Kehidupan di Pengungsian: Pandangan dari Bangladesh*. Malang: Fajar Ilmu
- Andriani, S. (2015). *Radikalisasi dan Konflik Etnis di Myanmar*. Yogyakarta: UGM Press.
- Anwar, M. (2019). *Krisis Rohingya: Perspektif Sosial dan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arifin, Z. (2017). *Migrasi Paksa: Rohingya dan Perjuangan Hidup di Pengungsian*. Jakarta: Kencana
- Bashar, S. (2011). *Language and Culture of the Rohingya*. Dhaka: Bangladesh National Press.
- Fahmi, M. (2019). *Identitas dan Kebijakan Nasionalisme di Myanmar*. Jakarta: Penerbit Mitra Bangsa.
- Fajar, Reza. *Geopolitik dan Krisis Rohingya: Analisis Hubungan Internasional*. Bandung: Masyarakat Studi Internasional, 2020
- Farouk, R. (2012). *The Rohingya: The History of a Muslim Minority in Myanmar*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Friedman, S. (1980), "Operasi Naga dan Akibatnya terhadap Rohingya," *Jurnal Sejarah Asia*.
- Haris, A. (2020). *Kekerasan terhadap Rohingya: Perspektif Internasional dan Dampaknya*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru.
- Hartati, D. (2019). *Keamanan Perempuan dan Anak-anak dalam Pengungsian Rohingya*. Jakarta: Grafindo.
- Hasan, M. (2014), "Politik Identitas Etnis di Myanmar: Diskriminasi terhadap Rohingya," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*.
- Ibrahim, A. (2016). *Rohingya and Rakhine: The Unraveling of a Harmony*. Jakarta: Nusantara Press.
- James, C. (2004). *The British in Burma 1824-1948*. Oxford University Press.
- Kumar, R. (2008). *Burma's Buddhist Identity vs. Rohingya Islam: Historical Conflicts*. *Journal of South Asian Studies*.

Kusuma, I. (2018). *Ketegangan Etnis Rakhine: Dampak Sosial bagi Rohingya*. Bandung: CV Alam Raya.

Lee, T. (2007). *Ethnic Conflicts in Burma: The Role of the British Empire*. Southeast Asia Journal.

Maung, M. (1997). *The Struggle for Rakhine: Ethnic Politics in Post-Colonial Burma*. Myanmar Studies.

Mulyana, A. (2018). *Krisis Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Prasetyo, D. (2018). *Kebijakan Pemisahan Etnis di Myanmar: Perspektif Sosial dan Politik*. Surabaya: Pustaka Ilmu.

Putra, Y. (2018). *Krisis Etnis Rohingya dan Perkembangan Politik Myanmar*. Bandung: Alfabeta.

Rahman, A. (2002), "Dinamika Sosial dan Konflik Etnis di Myanmar: Studi Kasus Rohingya," *Jurnal Humaniora dan Politik*.

Rahmawati, Siti. *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Isu Rohingya*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017.

Ramadhan, Z. (2019). *Tantangan Bantuan Kemanusiaan bagi Pengungsi Rohingya*. Yogyakarta: Pustaka Abadi.

Rashiduzzaman, M. (1977). *The Rohingya: A Historical Perspective*. Dhaka: University Press Ltd, hlm. 112.

Salim, F. (2021). *Bangladesh dan Pengungsi Rohingya: Analisis Sosial dan Politik*. Jakarta: Rajawali Press.

Simamora, R. (2018). *Krisis Rohingya: Serangan dan Reaksi Myanmar*. Medan: Media Press.

Simmons, R. (2013). *The Politics of Identity in Rakhine: The Rohingya Experience*. Jakarta: Pustaka Gramedia.

Smith, M. (1999). *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity*. Zed Books.

Sukandar, R. (2014). *Kekerasan Etnis dan Politik Identitas di Myanmar*. Jakarta: Pustaka Masyarakat.

Sumarno, W. (2019). *Kebijakan Kewarganegaraan Myanmar dan Implikasinya Terhadap Krisis Rohingya*. Jakarta: Penerbit Sejahtera.

Supriyadi, B. (2020). *Dinamika Pengungsi Rohingya: Struktur Sosial yang Terusir*. Surabaya: Erlangga.

Suryadi, A. (2020). *Pasca-Kolonialisme dan Dinamika Sosial di Myanmar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suryadinata, L. (2001), "Kewarganegaraan dan Kebijakan Minoritas di Myanmar: Kasus Rohingya," *Majalah Politik dan Sosial Asia*.

Susanto, R. (2021). *Politik Identitas dan Retorika Kebencian: Studi Kasus Rohingya di Myanmar*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Sutrisno, E. (2022). *Kebijakan Repatriasi Rohingya: Antara Harapan dan Realitas*. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga.
- Tan, S. (2001). *Burma's Ethnic Struggles and the British Legacy*. Indonesia Review.
- Taufik, H. (2017). *Myanmar: Etnisitas dan Krisis Rohingya*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Terkini, A. (2015). *Perang Etnis di Myanmar: Analisis Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Nusantara.
- Wijayanti, D. (2020). *Diplomasi Internasional dalam Krisis Rohingya*. Bandung: Alfabeta.
- Win, H. (2010). *British Colonialism and its Impact on Burma's Ethnic Groups*. Rangoon University Press.
- Zaw, P. (2012). *Politics in Burma: Rakhine and Rohingya Divide*. Asian Politics Quarterly.
- Lubis, Andi. *Krisis Pengungsi Rohingya: Perspektif Kemanusiaan dan Politik Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Wicaksono, Agung. *Politik Etnis dan Identitas di Asia Tenggara: Kasus Rohingya*. Jakarta: Pustaka Indonesia, 2018.